

Sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 3.496.700 kasus COVID-19 di seluruh 34 Provinsi di Indonesia, dengan 524.142 kasus aktif, 98.889 kematian, dan 2.873.669 orang telah dinyatakan pulih dari penyakit. Pemerintah juga mencatat kasus terduga sebanyak 130.628 orang.

kanal laporan warga (*citizen reporting platform*) LaporanCovid-19 pada tanggal 22 Juli 2021 mengumumkan 2.313 pasien COVID-19 yang meninggal dunia disaat menjalani isolasi mandiri dalam periode 1 Juni - 21 Juli 2021, termasuk sekitar 1.100 orang diantaranya berdomisili di Jakarta. Upaya isolasi mandiri dilakukan bagi pasien yang tidak bergejala atau mengalami gejala ringan, namun nampaknya terpaksa dilakukan oleh sebagian pasien terkait dengan keterbatasan fasilitas rumah sakit, yang diindikasikan dengan *bed occupancy rate* yang sangat tinggi sepanjang bulan Juli 2021. Pemerintah Provinsi Jakarta pada tanggal 19 Juli 2021 mengumumkan bahwa ada sekitar 1.900 orang yang harus menunggu untuk mendapat pelayanan rawat inap di berbagai rumah sakit di Jakarta.

Untuk meningkatkan upaya tracing, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 segera mengerahkan sekitar 17.000 *contact tracer* di seluruh Indonesia, dimulai bulan Agustus 2021. Mereka telah disiapkan dengan aplikasi SILACAK (Sistem Informasi Pelacakan) <http://silacak.kemkes.go.id/> dalam menjalankan tugas mereka. Pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi <https://pedulilindungi.id/> untuk penerapan digital tracing. Aplikasi telepon seluler ini telah digunakan oleh 15,3 juta pengguna di Indonesia dan akan diintegrasikan dengan data hasil tes Covid-19 dan data vaksinasi nasional.

Hingga 2 Agustus 2021, Indonesia telah menerima 178,3 juta vaksin dalam bentuk bahan baku dan vaksin jadi, termasuk 19,7 juta vaksin yang tiba melalui COVAX facility, seperti dilaporkan oleh Kementerian Luar negeri. Rincian kedatangan vaksin dapat dilihat sebagai berikut:

Vaksin	Total vaksin diterima (dalam jutaan dosis; baik bahan baku maupun siap pakai)	Keterangan
Sinovac Biotech	144,7	Bahan baku diolah oleh Bio Farma menjadi 117,3 juta dosis vaksin siap pakai.
AstraZeneca	18,5	Melalui Fasilitas COVAX, dukungan kerjasama Pemerintah Jepang dan Inggris serta pembelian bilateral
Moderna	8,1	dukungan Pemerintah AS melalui COVAX Facility
Sinopharm	7	Skema Gotong Royong pihak swasta dan 250.000 vaksin dukungan Uni Emirat Arab

Di bulan Agustus, sekitar 45 juta dosis vaksin akan tiba, yang terdiri dari vaksin Sinovac, AstraZeneca, Moderna dan Pfizer. Hingga akhir 2021, Pemerintah telah mengamankan 440 juta dosis vaksin COVID-19.

Indonesia menargetkan vaksinasi COVID-19 bagi 208,3 juta penduduk dan telah memberikan vaksin dosis pertama sebanyak 23 per 100 penduduk sasaran sampai dengan 2 Agustus 2021. Sementara capaian vaksinasi per kelompok prioritas adalah sebagai berikut:

Kelompok prioritas	Sasaran	Capaian – dosis I	Capaian – dosis II
Petugas medis	1,4 juta	1,59 juta (109%)	1,46 juta (99%)
Lansia	21,5 juta	4,86 juta (22%)	3,19 juta (15%)
Petugas publik,	17,3 juta	26,09 juta (150%)	11,85 juta (68%)

Masyarakat rentan dan umum	141,2 juta	14,16 juta (10%)	4,42 juta (3%)
Anak 12-17 tahun	26,7 juta	0,97 juta (3%)	11 ribu 0.04%

Pemerintah telah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di 141 kabupaten/kota di Indonesia hingga 9 Agustus 2021. Kebijakan tersebut dijelaskan secara rinci melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 dan 28 Tahun 2021.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan per tanggal 25 Juli 2021, 12.660 satuan pendidikan (2,4% dari total di Indonesia) pada Level 2 Zona Kuning (risiko rendah) dan Hijau (tidak ada kasus) yang diperbolehkan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, sesuai dengan Surat keputusan Bersama 4 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri). Sekitar 2% dari satuan pendidikan yang telah melaksanakan PTM terbatas melaporkan adanya penularan COVID-19 di satuan pendidikan mereka.

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) memperkirakan limbah medis di berbagai daerah yang mencapai 493 ton per hari, namun sebagian besar fasilitas pengolah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis tersebut (sekitar 78%) berada di Pulau Jawa, sehingga terdapat kesenjangan besar dalam pengelolaan sampah medis diantara pulau-pulau besar di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat adanya 18.460 ton limbah medis B3 per tanggal 27 Juli 2021, yang berasal dari fasilitas kesehatan, rumah sakit darurat, pusat isolasi dan karantina, tes deteksi, dan vaksinasi. Presiden telah meminta percepatan ketersediaan fasilitas pengolahan limbah medis termasuk insinerator dan autoclave untuk mengelola peningkatan jumlah limbah medis.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa 13,7 juta dari 64 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah telah melakukan penjualan secara daring. Jumlah tersebut terus meningkat di Tanah Air, meskipun mayoritasnya berada di kota-kota besar di Pulau Jawa. Pada tahun 2020-2021, transaksi daring meningkat sebesar 548 juta transaksi atau 99 persen, dengan nilai transaksi IDR 88 triliun, yang merupakan peningkatan sebesar 52 persen.

Pemerintah telah meningkatkan total anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari IDR 699,43 triliun menjadi IDR 744,75 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus COVID-19. Alokasi tersebut mencakup program sebagai berikut:

- o Kesehatan: IDR. 214,95 triliun,
- o Perlindungan sosial: IDR. 187,84 triliun, yang meliputi program bantuan sosial tunai, kartu sembako, bantuan beras, diskon listrik dan Kartu Pra Kerja
- o Dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi: IDR. 161,20 triliun.
- o Insentif Usaha dan Pajak: IDR. 62,83 triliun.
- o Program Prioritas: IDR. 117,94 triliun.

Realisasi program PEN hingga akhir Juli 2021 mencapai IDR 305,5 triliun atau 41 persen dari pagu anggaran.

Humanitarian Country Team (HCT) di bawah pimpinan UN Resident Coordinator bertemu pada 13 Juli 2021 untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan kemanusiaan yang krusial akibat munculnya kasus COVID-19. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memaparkan hasil analisis yang didapat melalui rapat pertemuan Klaster Nasional yang telah dilakukan dalam beberapa minggu sebelumnya. Untuk memastikan pemahaman bersama tentang situasi saat ini, pertemuan lain diadakan pada 28 Juli 2021 dan diikuti oleh anggota HCT dan para mitra internasional, di mana Kemenko PMK menjelaskan kebijakan yang telah diambil Pemerintah, tanggapan yang telah dilakukan dengan semangat kolaborasi multi-stakeholder melalui National Cluster tentang Penanggulangan Bencana. Kementerian Sosial, yang memimpin Klaster Pengungsian dan Perlindungan Nasional, juga memberikan informasi rinci tentang kegiatan yang sedang berlangsung dan yang direncanakan setiap sub-klaster dan kelompok kerja di dalam Klaster Nasional tersebut.